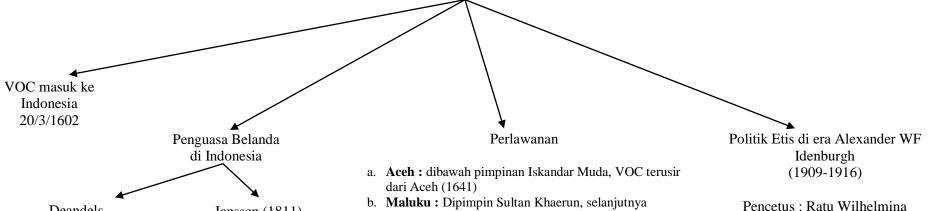
#### PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN MELAWAN BELANDA DI INDONESIA



Deandels (1808-1811)Tugas:

- a. Mempertahankan Jawa dari Inggris
- b. Meningkatkan pertahanan dan administrasi
- c. Memberantas feodalisme
- d. Tentara pribumi
- e. Membuat jalan anyerpanarukan
- f. Membentuk 3 peradilan

Janssen (1811) Batavia Jatuh ke Inggris

Inggris: Raffles (1811-1816)

- a. Kurang rasa terimakasih
- b. Konflik dengan keraton Jogja
- c. Menetapkan sewa tanah
- d. Menghapus pajak dan penyerahan wajib hasl bumi
- e. Tidak ada kerja rodi
- Tidak ada monopoli
- g. Dibentuk 'desa'

1816: Jatuh ke Belanda lagi

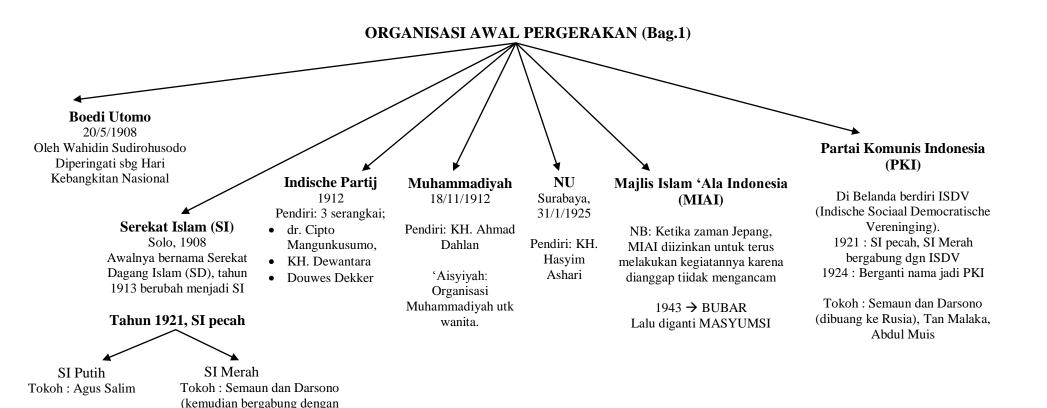
- a. Perwakilan di Indonesia: Johannes Bosch
- b. Terkenal dengan "Tanam Paksa"
- c. Kemudian dikomplain Max Havelar dan lahirlah UU Agraria

- Sultan Baabullah
- c. Mataram: Dipimpin Sultan Agung. Berusaha menyerang Batavia tapi gagal. Mataram kemudian dipimpin Amangkurat tapi lemah
- d. Banten: Dipimpin Sultan Agung Tirtayasa
- e. Maluku: Dipimpin Pattimura dan Christina Martha T.
- f. Gowa: Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lokasi: Benteng Somba Opu. Kemudian ada Pernjian Bongaya
- g. Bali: Perang puputan dipimpin oleh I Gusti Ketut **Jelantik**
- h. Batak: Dipimping Sisingamangaraja
- i. Sumatera Barat : Perang Padri dipimpin Imam **Boniol**
- Jogja dan Surakarta: Dipimpin Pangeran Diponegoro

Terkait:

- a. Edukasi : Bangun seklah
- b. Irigasi: Bangun irigasi
- c. Transmigrasi: Mengajak penduduk untuk pindah

Politik etis ini terjadi karena kritik dari Van Deventer dalam artikel Een Eereschlud' (hutang kehormatan)





PKI)

mendiancy

#### MENUJU SUMPAH PEMUDA

# Kongres Pemuda 1 30/4-2/5 1926

Kongres pemuda di Jakarta Ketua: M.Tabrani

Tujuan: untuk membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal

Pidato M. Yamin tentang penggunaan Bhs Melayu sbg bahasa pergaulan mendapat perhatian

Hasil: Menerima cita-cita persatuan Indonesia

15/8/1926 : Jong Indonesia berdiri

Kongres Pemuda 2 28/10/1928

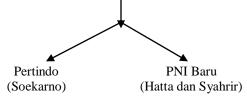
#### Lahir SUMPAH PEMUDA

### PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)

Didirikan oleh Soekarno (4/7/1927)

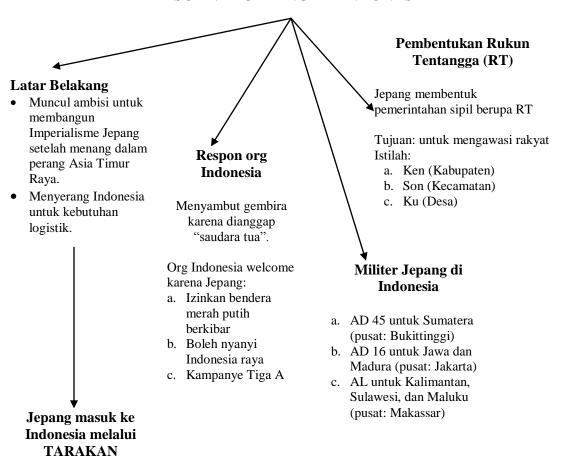
Pidato Soekarno pembelaan (Pledoi) Soekarno ketika ditangkap berjudul "Indonesia menggugat"

Selama Soekarno dipenjara, PNI pecah

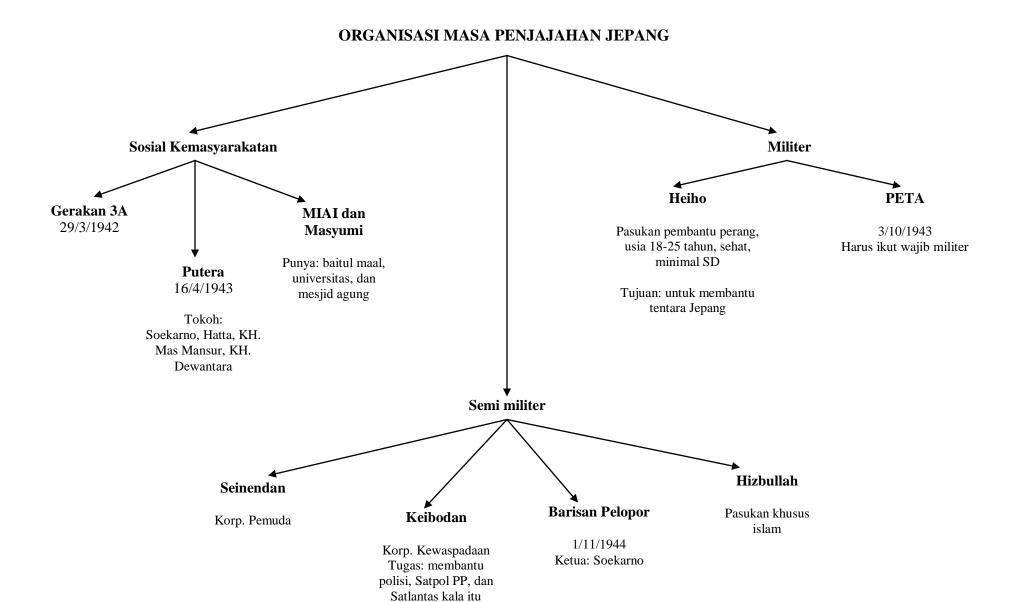


Menekankan mobilisasi massa Menekankan organisasi kader

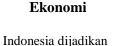
#### MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA



Tanggal 12/1/1942.



#### KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA



- Indonesia dijadikan sebagai sumber logistic
- Jepang mengontrol harga
- Ekonomi perang

# Pendidikan dan Kebudayaan

- Jumlah sekolah berkurang
- Jepang mengharuskan kerja bakti

#### Romusha

Untuk menarik simpati, romusha dilabeli "Pejuang ekonomi/Pahlawan pekerja"

# **Perlawanan**Penderitaan rakyat tidak berkurang

Muncul perlawanan:

- a. Aceh: Abdul Jalil
- b. Singaparna: Zainal Mustafa
- c. Indramayu:
- d. Kalimantan: Pang Suma
- e. Irian Barat (Biak): Gerakan Koreri (Rumkorem)
- f. PETA di Blitar: Supriyadi

### AKIBAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA



- Melarang penggunaan bahasa Belanda
- Wajib berbahasa Jepang
- 7/9/1943 → Pertama kali janji kemerdekaan disebutkan
- Romusha
- Banyak romusha yang meniggal
- Obat-obatan susah didapat
- Semua saluran komunikasi dan ekonomi dikuasai Jepang
- Wajib pendidikan tingkat dasar (6 thn)
- Bahasa Indonesia dijadikan bhs pengantar di sekolah
- Wajib belajar budaya dan bahasa Jepang
- Dibuka beberapa perguruan tinggi, yaitu kedokteran (Jakarta), Teknik (bandung), pamong praja (Jakarta), hewan (bogor)

PETA  $\rightarrow$  BKR  $\rightarrow$  TKR

JANJI KEMERDEKAAN Proklamasi 17/8/1945 Di Jl. Pegangsaan Timur 56 September 1944 (Tidak jadi di IKADA karena Kuniaki Kaiso potensi konflik dengan Jepang) Mengizinkan bendera Jepang Jatuh Dibentuk BPUPKI merah putih berkibar 1/3/1945 Peristiwa disamping bendera **Dibentuk PPKI**  $6/8/1945 \rightarrow Bom$ Rengasdengklok Jepang 7/8/1945 Sidang  $1 \rightarrow 18/5 - 1/6$ Hiroshima 16/8/1945 1945  $9/8/1945 \rightarrow Bom$ Jenderal Terauchi Pancasila lahir Nagasaki Soekarno-Hatta dibawa ke menyetujui Rengasdengklok pembentukan PPKI Sidang  $2 \rightarrow 10$ -15/8/1945 → 11/6/1945 Jepang menyerah Tokoh Muda: Yusuf Kunto, Piagam Jakarta sah Menjadikan Pancasila tanpa syarat pada Wikana, Chairul Shaleh menjadi pembukaan sebagai dasar negara sekutu UUD 1945 Tokoh Tua: Ahmad Subarjo

#### SETELAH KEMERDEKAAN

### Usaha perebutan pasca Proklamasi

- Berita kemerdekaan disebarkan melalui radio dan media cetak
- 20/8/1945 → Pemancar radio disegel, lalu pemuda buat baru di Menteng31
- 3/9/1945 → berhasil ambil alih kereta api dan bengkel di Manggarai
- 5/9/1945 → gedung radio dikuasai kembali
- 11/9/1945 → Seluruh Jawatan radio berhasil dikuasai.
   Sekarang jadi hari lahir RRI
- 19/9/1945 → Rapat besar di lapangan IKADA (sekarang monas)
- 19/9/1945 → Dukungan dari kesultanan
- 19/9/1945 → Bendera merah putih biru dikibarkan di Hotel Yamato Surabaya. Pemuda menyerang hotel Yamato

### Sidang PPKI pascaproklamasi

- 18/8/1945 → penyusunan dan pengesahan UUD 1945. Pengesahan pancasila dengan perubahan pada sila-1. Secara aklamasi, Soekarno-Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (atas usul Otto Iskandardinata).
- 19/8/1945 → Sidang pembentukan departemen dan pemda. Wilayah NKRI dibagi jadi 8 provinsi: Jawa tengah, jawa timur, borneo, Sulawesi, Maluku, sunda kecil, sumatera, jawa barat + DIY dan Surakarta. Selain itu dibentuk 12 departemen
- Pertemuan kecil 19/8/1945 : menunjuk anggota KNIP
- 22/8/1945 → KNIP diresmikan, dan anggota dilantik pada 29/8/1945. KNPI memutuskan pembentukan partai politik
- 2/9/1945 → Kabinet pertama terbentuk.
- $5/10/1945 \rightarrow TKR$  dibentuk

#### Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan

- Secara politis masih belum mapan. Masih ada ketegangan dan kekacauan.
- Belanda (NICA) masuk kembali dengan membonceng sekutu.
- Terjadi inflasi yang cukup parah karena peredaran rupiah Jepang yang tidak terkendali.
- Ada blockade yang dilakukan NICA sehingga ekonomi makin parah
- Ada 3 jenis mata uang yang beredar waktu itu + mata uang NICA ketika mereka masuk lagi.
- 1/10/1946 → Keluar ORI (Oeang Republik Indonesia).
- Sudah tidak ada lagi diskriminasi. Dan pendidikan diselenggarakan dgn alam kemerdekaan.

### Belanda Masuk Lagi

- Sekutu masuk ke Indonesia dibonceng NICA.
- 16/9/1945 → Rombongan NICA (Van Mook) dan Sekutu (WR. Patterson) masuk ke Indonesia melalui Tanjung Perak Surabaya.
- 29/9/1945 → 3 divisi AFNEI bentukan sekutu ditempatkan di Indonesia
- 1/10/1945 → Pimpinan AFNEI mengakui Indonesia secara de facto tetapi kemudian dilanggar.

#### Pertempuran setelah kemerdekaan

- Pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang terkait penyerahan senjata (14-19/10/1945).
- Pertempuran di Jogja melawan Jepang (26/9/1945). 27/9 kekuasaan jatuh ke Indonesia.
- 7/10/1945 → perebutan senjata jepang di Jogja
- 25/10/1945 → Pasukan AWS
   Mallaby mendarat di Surabaya
   utk melucuti senjata Jepang.
   Tapi ingkar janji.
- Arek-arek Surabaya melawan sekutu→ 10/11/1945. Dipimpin Bung Tomo.
- Pertempuran ambarawa → 29/11 – 15/12/1945 melawan inggris. Dipimpin Kolonel Sudirman
- Medan Area karena bendera merah putih diinjak oleh salah satu penghuni hotel.
- Bandung lautan api → NICA menyerang rakyat Bandung yang sedang kebanjiran.
   23/3/1946 → sekutu ultimatum agar Bandung dikosongkan.
   Kolonel AH. Nasution perintahkan rakyat untuk mengungsi tgl 24/3/1946 dan membakar bangunan.
- Operasi lintas laut banyuwangi
   bali.

#### PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA

# Perjanjian Linggarjati 11-15/11/1946

Wakil Belanda : Van Mook

# • Wakil Indonesia : Syahrir

#### Hasil:

- Belanda mengakui kekuasan defacto Indonesia (Jawa, Madura, dan Sumatera).
   Daerah yang dikuasai belanda dan sekutu akan dikembalikan berangsur-angsur
- Dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS)
- Pem. Belanda dan RI akan bentuk Uni Indonesia-Belanda
- NIS dan Uni Indonesia-Belanda selesai sblm 1/1/1949
- Pem. RI mengakui, akan memulihkan dan lindungi hak milik asing
- Pem Rid an belanda sepakat untuk kurangi jumlah tentara
- Kalau ada perselisihan, akan diselesaikan oleh komite arbitrase

#### Agresi Militer I

- 21/7/1947 → Belanda menyerang Indonesia. menguasai seluruh pelabuhan di Jawa. Penangkapan orang china di Jawa Barat. Bangsawan di Sumatera dibunuh.
- 29/8/1947 → Belanda deklarasikan garis demarkasi Van Mook yang membuat wilayah Indonesia lbh sedikit
- 18/9/1947 → Komisi 3 negara dibentuk utk menyelesaikan masalah.

#### ▼ Perjanjian Renville 8/12/1947

- Upaya untuk menyelesaikan masalah di Agresi Militer 1.
- Delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin
- Belanda dipimpin : R. Abdulkadir Wijoyoatmojo
- Perjanjian diadakan diatas kapal Renville.

#### Hasil:

- Garis demarkasi Van Mook diterima
- Sepakat utk menyelesaikan masalah secara damai
- Kedaulatan Indonesia berada ditangan belanda selama masa peralihan

### Agresi Militer II

- Sudah ada tanda-tanda Belanda akan langgar Renville.
- 19/12/1947 → Agresi Militer II
- Ibu Kota Jogjakarta berhasil dikuasai.
- Pimpinan negara ditawan Belanda.
- Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI dengan ibukota Bukittinggi.
- Panglima Sudirman melalukan perang gerilya



DK PBB membuat resolusi agar Indonesia dan Belanda berhenti perang dan memerintahkan Belanda untuk membebaskan tahanan politik.

# Persetujuan Roem Royen 14/4/1949

- Wakil Indonesia : Muh. Roem.
- Wakil Belanda : Van Royen
- Wakil AS: Merle Cochran

#### Hasil:

- Indonesia akan hentikan perang gerilya, ikut dalam KMB di den haag.
- Belanda mengembalikan RI ke Jogja, bebaskan seluruh tahanan politik, dan menghentikan gerakan militer., dan menyetujui RI sebagai bagian dari NIS

# Konferensi Meja Bundar (KMB)

# Den Haag, 23/8/1949

#### Hasil:

- Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat.
- Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian
- Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi oleh para delegasi di KMB.
- Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda yang sifatnya longgar
- RIS harus bayar hutang Hindia Belanda
- RIS akan kembalikan hak milik belanda dan kasih izin untuk perusahaan Belanda

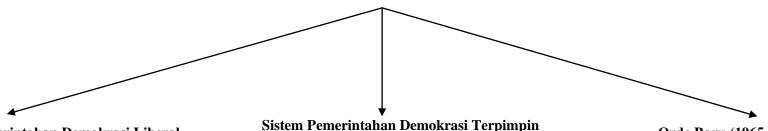


Soekarno terpilih jadi Presiden RIS. Presiden RI sementara diisi oleh Mr. Assaat (Ketua KNIP)



RIS berakhir, dan terbentuklah NKRI.

### SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 1)



# Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal (1950-1959)

- Perdana Menteri (PM) pertama adalah Syahrir.
- Sering terjadi pergantian kabinet karena perbedaan kepentingan masing-masing parpol
- Sistem pemerintahan seperti ini mendorong munculnya banyak partai
- Pemilu parlemen (1955) dilaksanakan pertama kali ketika kabinet Burhanuddin Harahap.
- Kebijakan ekonomi "gunting syarifuddin" diterapkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
- Kondisi ekonomi Indonesia makin parah karena masih ada hutang pada Belanda.
- Indonesia berusaha merundingkan masalah ekonomi tersebut, tapi ditolak belanda. Akhirnya Indonesia secara sepihak membubarkan diri dari Uni Indonesia-Belanda (13/2/1956)

# Kehidupan sospol Indonesia ketika Demokrasi liberal

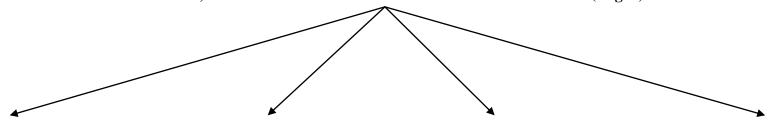
(1959-1965)

- tidak pernah stabil.
  Soekarno mengeluarkan dekrit 5/7/1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante, kembali ke UUD 1945, dan pembentukan MPRS.
- Kabinet pertama pada era ini adalah kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sebagai PM.
- Konflik antara DPR dengan Presiden sehingga DPR hasil pemilu dibubarkan Soekarno pada 5/3/1960.
- Dwi tunggal mulai retak
- Kekuatan politik di era ini berpusat di tangan Soekarno
- PKI bangkit kembali
- Sistem ekonomi → Sistem ekonomi komando
- Untuk mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah melakukan devaluasi mata uang (1000 → 100).
   Kemudian berubah lagi dari Rp. 1000 → Rp.1.
- Harga minyak naik, dan muncullah TRITURA
- Pembebasan Irian Barat. 1/5/1963 Irian Barat diserahkan ke Indonesia.
- Terjadi konfrontasi dengan malaysia

# Orde Baru (1965-1998)

- Mandat Soekarno pada Soeharto melalui supersemar untuk memulihakan kewibawaan negara
- Terjadi dualisme kepemimpinan; Soekarno masih menjabat presiden, tapi pamor turun, sementara Soeharto pamor naik karena berhasil membubarkan PKI.
- Tahun 1968, Soeharto dikukuhkan menjadi presiden RI.
- Soeharto mengembalikan politik luar negeri ke Politik bebas aktif.
- Melaksanakan Repelita dan pemilu
- Mengikis habis sisa-sisa PKI di Indonesia.
- Pelaksanaan program P4 ditingkat nasional dan daerah
- Dwifungsi ABRI
- Kebijakan ekonomi orde baru menunjukkan hasil positif dan inflasi terus turun.
- Kebijakan selama orde baru: SD inpres, swasembada pangan, KB, posyandu,
- Integrasi timor-timor ke Indonesia

### SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 2)



### Reformasi (1998 – sekarang) Kepemipinan BJ Habibie

- Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan pada orde baru mendorong REFORMASI 1998.
- Agenda reformasi: suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, hapus dwifungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, pelaksanaan otoda.
- 21/5/1998 → Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan Presiden RI.
- Kepemimpinan digantikan BJ Habibie
- Krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir.
- Dimulainya amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999
- Pencabutan P4
- Masa jabatan presiden dan wakil dibatasi jadi 5 tahun
- Penghapusan dwifungsi ABRI
- Keluar TAP-MPR terkait kebebasan berpendapat, pers, berserikat, dan pembebasan tapol.
- Diberlakukannya otonomi daerah
- Aturan pembatasan partai DICABUT
- Pemilu 1999
- Referendum Timor-timor (pisah dari Indonesia)
- MPR tgl 20/10/1999 menolak LPJ BJ. Habibie. Paginya beliau mengumumkan mundur dari jabatan.

### Reformasi (1998 – sekarang) Abdurrahmahman Wahid

- Terpilih tgl 20/10/1999
- Amandemen UUD 1945 yang ke-2 (tahun 2000)
- Amandemen berkaitan dgn susunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
- Pemisahan TNI dan POLRI.
- Pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk memeluk agama Konghuchu
- Gusdur mendukung pluralism
- Gusdur diberhentikan oleh MPR dan mengangkat Megawati sebagai presiden tgl 23/7/2001

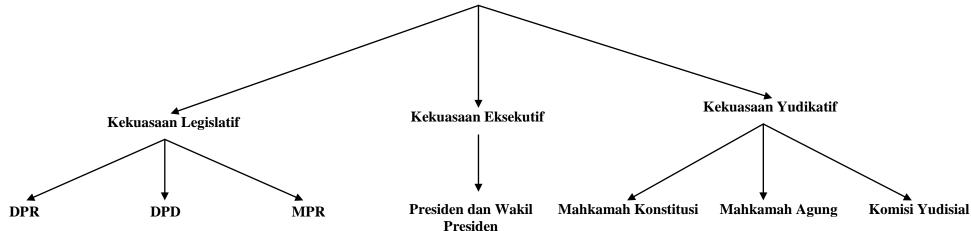
## Reformasi (1998 – sekarang) Megawati Soekarno Putri

- Membentuk KPK
- Amandemen UUD 1945 yg ke-3 (2001).
- Perubahan penting terkait pemilu presiden dan wakil secara langsung yang akan diadakan thn 2004
- Tingkat inflasi rendah dan stabilnya cadangan devisa
- 2 provinsi (NAD dan Papua) berkeinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia.
- Terjadi sengketa Sipadan dan Ligitan
- Keluar UU Tipikor
- Pemilu langsung pertama thn 2004 sukses dilaksanakan.

### Reformasi (1998 – sekarang) SBY

- Presiden pertama yang dipilih melalui pemilu langsung.
- Program BLT untuk memberantas kemisikinan
- Bantuan dana BOS untuk pendidikan
- Otonomi khusus bagi Papua
- Terpilih lagi di pemilu 2009

### PEMBAGIAN KEKUASAN INDONESIA (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL)



Fungsi DPR: Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

Hak DPR: Hak Interpretasi, hak angket, hak mengajukan pendapat

Kelengkapan DPR: Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah tangga, Komisi

# Dasar hukum:

Pasal 11 (2), 14 (2), 20 (1,2), 22 (2), 23 (2), 22D (3), 22E (2), 24B (3), dan 24A (3) UUD 1945

Merupakan badan legislative yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia

Fungsi DPD: Fungsi Legislasi, fungsi pengawasan, fungsi pengawasan (terkait dengan kegiatan otonomi)

DPD dapat mengusulkan RUU terkait otonomi daerah

Jumlah anggota 1/3 anggota DPR

Dasar hukum: 22D (1,2,3) dan 23F (1) UUD 1945 Jumlah anggota 550 org/4x DPD

- Berhak merubah dan menetapkan UUD
- Berhak melantik/memberh entikan presiden

Kelengkapan MPR:

- Pimpinan Majlis
- Badan Pekerja Majlis
- Komisi Majlis
- Ad Hoc

Dasar Hukum Pasal 2 dan 3 UUD 1945 Presiden

Presiden

Dibantu menterimenteri (kabinet)

Presiden punya kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara:

Dasar Hukum Pasal 4 (1), 5 (1), 11 (1), 12, 13 (1), 14 (1), 15,16, 17 (2), 20 (2), 24A (3), dan 24C (3) UUD 1945 Tugas dan wewenang:

- Menguji UU terhadap UUD 1945
- Memutus sengketa lembaga negara
- Memutus pembubaran parpol
- Memutus perselisihan hasil pemilu
- Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil melakukan pelanggaran

Dasar Hukum: 24C (1 dan 2) UUD 1945 MA adalah pengadilan • negara tertinggi (kasasi)

Fungsi: Fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi legislasi

Tugas:

- Mengadili di tingkat kasasi
- Menguji peraturan perundangundangan dibawah UU
- Mengawasi kegiatan pengadilan di lingkungan peradilan

Dasar Hukum: 24 (2), 24A (1), dan 24C (3) UUD 1945

- KY berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan para hakim
- Membuka pendaftaran, seleksi, dan menetapkan calon hakim agung

Dasar Hukum: 24A (3) dan 24B (1) UUD 1945

# **SUMMARY ISI UU 1945\***

P	A		Kandungan	
	BAB 1: Bentuk dan Kedaulatan			
1	1	:	Indonesia adalah NKRI	
	2	:	Kedaulatan ada di tangan rakyat	
	3	:	Indonesia adalah negara hukum	
			BAB 2 : MPR	
2	1	:	Anggota MPR	
	2	:	Sidang min. 1x5 thn di ibukota	
			negara	
	3	:	Putusan MPR ditetapkan melalui	
			voting	
3	1	:	MPR berwenang mengubah UUD	
	2	:	Melantik presiden dan wakil	
	3	:	MPR dapat memberhentikan	
			pres/wakil	
BA	<b>AB</b> 3	: K	Lekuasaan Pemerintahan Negara	
4	1	:	Presiden memegang kekuasaan	
			pemerintahan	
	2	:	Presiden dibantu wakil presiden	
5	1	:	Presiden boleh mengajukan RUU	
	2	:	Presiden menetapkan PP	
6	1	:	Calon presiden dan wakil harus WNI	
	2	:	syarat calon ditetapkan melalui UU	
6A	1	:	Presiden dan wakil dipilih langsung	
UA	1	•	oleh rakyat	
	2	:	Pasangan calon diusulkan oleh	
		•	parpol peserta pemilu	
	3		Ketentuan calon yang menang	
	4	:	Putaran 2 pemilu	
	5	·	Tatacara pemilu diatur dalam UU	
7		:	Masa jabatan presiden dan wakil	
'		•	(2x5thn)	
7A		:	MPR dapat memberhentikan	
			presiden/wakil atas usul DPR	
7B	1	:		
	2	:	Prosedur pemberhentian Presiden	
	3	:	dan/atau wakil	
	4	:		
		•		

5	<u> </u>	Prosedur pemberhentian Presiden		
6	<u> : </u>	dan/atau wakil		
7	<u>'</u> :	dan/atau wakii		
7C	:	Presiden tidak dapat membubarkan DPR		
8 1	.   :	Jika presiden mundur, digantikan wakil presiden		
2	:	Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya		
3	:	Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan.		
9 1		Sumpah presiden		
2		Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang		
10	:	Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU		
11 1	:	Presiden nyatakan perang atas izin DPR		
2	:	Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR		
3	:	Berikutnya diatur dalam UU		
12	:	Presiden menyatakan keadaan bahaya		
13 1	:	Presiden angkat duta dan konsul		
2	:	Harus perhatikan pertimbangan DPR		
3	:	Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR		
14 1	:	Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA		
2	:	Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR		
15	:	Ketentuan memberi gelar dan tanda		
		jasa, dan tanda lainnya		
16	:	Pembentukan dewan pertimbangan		
BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung				
(DIHAPUS)				
		B 5 : Kementrian Negara		
17 1	:	Presiden dibantu menteri		

2	:	Diangkat dan diberhentikan
		presiden
3	:	Menteri membidangi urusan
		tertentu
4	:	Pembentukan pengubagan, dan
		pembubaran kementrian diatur UU
	BA	AB 6 : Pemerintah Daerah
1	:	
2	:	
3	:	Damarintah daarah atanami saluas
4	:	Pemerintah daerah, otonomi seluas- luasnya
5	:	luasilya
6	:	
7	:	
1	:	Hubungan pusat dan daerah
		memperhatikan keberagaman
		daerah
2	:	Hub. Keuangan, pelayanan,
		pemanfaatan SDA dilakukan scr
		adil
1	:	Negara mengakui dan menghormari
		satuan pemda khusus
2	:	Negara mengakui dan menghormati
		masy. Hukum adat
		BAB 7 : DPR
1	:	Anggota DPR dipilih melalui
		pemilu
2	:	Susunan DPR diatur dlm UU
3	:	Sedang DPR min 1x1thn
1	:	Punya kuasa untuk membentuk UU
2	:	Setiap RUU dibahas oleh DPR
3	:	Jika tidak disetujui, RUU bisa
		diajukan lagi
4	:	Presiden mengesahkan RUU → UU
5	:	Pengesahan RUU → UU jika tidak
		disahkan presiden
1	:	Fungsi DPR
2		Hak DPR
3	:	Hak anggota DPR
4	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU
	3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3	3 : 4 :  BA  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 1 : 2 : 1 : 2 : 3 : 1 : 2 : 3 : 1 : 2 : 3 : 1 : 2 : 3 : 1 : 2 :

21		:	Anggota DPR boleh ajukan RUU
22	1	:	Presiden bisa tetapkan PP
	2	:	PP harus disetujui DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, harus dicabut
22A		:	Ketentuan berikutnya diatur UU
22B		:	Anggota DPR dapat diberhentikan
			BAB 7A: DPD
22C	1	:	Anggota DPD dipilih melalui
			pemilu
	2	:	Jumlah anggota DPD
	3	:	Min. sidang 1x1 thn
	4	:	Susunan DPD diatur dlm UU
22D	1	:	Hak mengajukan RUU ttg otoda
	2	:	Ikut membahasa RUU otoda
	3	:	Kegiatan pengawasan DPD
	4	:	Anggota DPD dapat diberhentikan
			BAB 7B : Pemilu
22E	1	:	Pemilu luber jurdil
	2	:	Siapa yang dipilih melalui pemilu
	3	:	peserta pemilu DPR = parpol
	4	:	Peserta pemilu PDD = individu
	5	:	Sifat pemilu
	6	:	Ketentuan berikutnya dlm UU
			BAB 8 : Hal Keuangan
23	1	:	APBN ditetapkan dgn UU
	2	:	RUU APBN diajukan presiden
	3	:	Jika RUU APBN tidak disetujui
			DPR, pakai APBN tahun lalu
23A		:	Pajak
23B		:	Mata uang
23C		:	Ketentuan keuangan lain diatur dlm
			UU
23D		:	Bank Sentral (Dasar Hukum BI)
BAB 8A: BPK			
23E	1	:	Fungsi BPK
	2	:	Pelaporan hasil pemeriksaan BPK
	3	:	Tindaklanjut laporan BPK
23F	1	:	Anggota BPK
	2	:	Pimpinan BPK
23G	1	:	Kedudukan BPK
	2	:	Ketentuan BPK lain dalam UU

	В	AB	9 : Kekuasaan Kehakiman		
24	1	:	Sifat kekuasaan kehakiman		
	2	:	Pelaksana kekuasaan kehakiman		
	3	:	Badan kekuasaan kehakiman lain		
			diatur dlm UU		
24A	1	:	Mahkamah Agung		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
	5	:			
24B	1	:	Komisi Yudisial		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
24C	1	:	Mahkamah Konstitusi		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
	5	:			
	6	:			
25		:	Syarat hakim diatur dalam UU		
	BAB 9A : Wilayah Negara				
25		:	NKRI		
В	AB	10	: Warga Negara dan Penduduk		
26	1	:	Pengertian WNI		
	2	:	Pengertian penduduk		
	3	:	Ketentuan WN dan penduduk		
			diatur dalam UU		
27	1	:	Kedudukan dihadapan hukum		
	2	:	Berhak atas pekerjaan dan		
			penghidupan yang layak		
	3	:	Setiap WN wajib ikut bela negara		
28		:			
	BAB 10A : HAM				
28A		:	Hak hidup dan mempertahankan		
			hidup		
28B	1	:	Hak berkeluarga dan punya		
	_		keturunan		
	2	:	Hak atas kelangsungan hidup dan		
20.0	_	<u> </u>	perlindungan dari kekerasan		
28C	1	:	Hak mengembangkan diri melalui		

			penddikan, teknologi, seni, dll
	2	:	Hak memperjuangankan hak secara
			kolektif
28D	1	:	Hak pengakuan, jaminan,
			perlindungan, kepastian hukum
	2	:	Hak untuk dapat gaji yang layak
	3	:	Hak untuk dapat kesempatan yang
			sama di pemerintahan
	4	:	Hak atas status kewarganegaraan
28E	1	:	Hak memeluk agama dan beribadah
	2	:	Hak bebas meyakini
			kepercayaannya
	3	:	Hak untuk berserikat, berkumpul,
			dan berpendapat
28F		:	Hak untuk berkomunikasi dan
			peroleh informasi
28G	1	:	Hak perlindungan harkat dan
			martabat
	2	:	Hak bebas dari penyiksaan dan
			bebas dr perlakuan merendahkan
28H	1	:	Hak hidup sejahtera lahir batin
	2	:	Hak untuk dapat kemudahan
	3	:	Hak jaminan sisal
	4	:	Hak untuk punya hak milik pribadi
28I	1	:	Hak untuk hidup dan tidak disiksa,
			merdeka, tidak diperbudak
	2	:	Hak bebas dari diskriminasi
	3	:	Identitas dan hak masyarakat
			tradisional
	4	:	Pemenuhan HAM adalah tugas
			pemerintah
	5	:	Ketentuan HAM lain diatur dalam
			UU
28J	1	:	Wajib menghormati hak orang lain
	2	:	Wajib tunduk pada pembatasan
			yang diatur dalam UU
			BAB 11 : Agama
29	1	:	Negara berdasar Ketuhanan YME
	2	:	Negara jamin kebebasan beragama
BAI	3 12	: P	ertahanan dan Keamanan Negara
30	1	:	Setiap WN wajib ikut menjaga

			pertahanan dan keamanan negara
	2	:	Usaha pertahanan dilakukan
			melalui sistem pertahanan
	3	:	TNI
	4	:	POLRI
	5	:	Susunan TNI dan POLRI diatur
			dalam UU
F	BAB	13	: Pendidikan dan Kebudayaan
31	1	:	Setiap WN berhak atas pendidikan
	2	:	Setiap WN wajib ikut pendidikan
			dasar dan pemerintah harus biayai
	3	:	Sistem pendidikan nasional
	4	:	Anggaran pendidikan min. 20%
	5	:	Nilai agama dan persatuan dalam
			pendidikan
32	1	:	Kebebasan memelihara budaya
	2	:	Menghormati bahasa daerah
]	BAE	<b>3 1</b> 4	: Perekonomian nasional dan
			kesejahteraan sosial
33	1	:	Asas kekeluargaan dalam ekonomi
	2	:	Cabang produksi penting dikuasai
			negara
	3	:	Bumi, air, dan isinya digunakan
			untuk kesejahteraan rakyat
	4	:	Asas demokrasi ekonomi dan
			prinsip ekonomi nasional
	5	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU
34	1	:	Fakir miskin dipelihara negara
	2	:	Sistem jaminan sosial
	3	:	Negara wajib sedikan fasilitas
			pelayanan kesehatan dan umum
			yang layak
	4	<u> </u>	Ketentuan berikutnya diatur UU
BAE	3 15	: B	endera, bahasa, lambing, dan lagu
25	1		kebangsaan
35 36		:	Bendera merah putih Bahasa Indonesia
36A		-	Lambang → garuda pancasila
36B		H	Lagu → Indonesia raya
36C		H	Ketentuan selanjutnya diatur dlm
300		•	UU
	<u> </u>		UU

	BAB 16 : Perubahan UUD			
37	1	:	Usul perubahan diagendakan dlm	
			sidang MPR	
	2	:	Setiap usulan harus tertulis	
	3	:	Perubahan harus dihadiri min. 2/3	
			anggota MPR	
	4	:	Putusan harus diambil min 50%+1	
			anggota MPR	
	5	:	Bentuk Negara Kesatuan RI tidak	
			boleh dirubah	

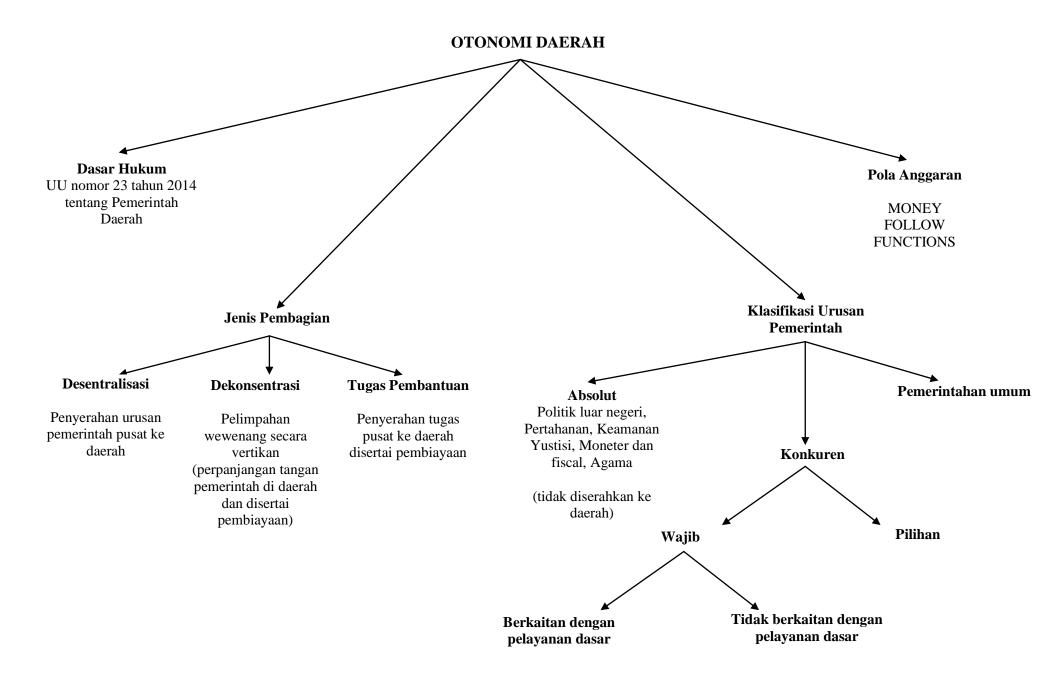
#### Keterangan:

- P: Pasal
- A : Ayat
- UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
- Hasil amandemen UUD 1945 pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999
- Hasil amandemen UUD 1945 kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000
- Hasil amandemen UUD 1945 ketiga disahkan tanggal 9 November 2001, dan
- Hasil amandemen UUD 1945 keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

\*Disclaimer: Kandungan UUD yang dalam tabel diatas hanyalah GARIS BESAR dari isi UUD 1945 agar mudah dihafal. Untuk pemahanan yang lebih komprehensif, silahkan merujuk langsung ke UUD 1945

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG PENTING DIKETAHUI

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
- 5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 6. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan BPJS
- 7. TAP MPR nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan POLRI dan TNI
- 8. TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang pencabutan P\$
- 9. TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan
- 10. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 11. TAP MPR nomor 9 tahun 1999 tentang pancasila sebagai sumber hukum
- 12. Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang KPU
- 13. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- 14. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi



#### PANCASILA DAN KANDUNGANNYA

# 1. Sila ke-1: "Ketuahanan Yang Maha Esa Kandungan:

- a. Percaya kepada Tuhan
- b. Saling menghormati sesame pemeluk agama
- c. Hidup rukun
- d. Agama adalah urusan pribadi
- e. Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain

# 2. Sila ke-2 : "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

#### Kandungan:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai martabatnya
- b. Persamaan derajat
- c. Saling mencintai dan tenggang rasa
- d. Melakukan kegiatan kemanusiaan
- e. Mendorong kebaikan dan memerangi kejahatan

#### 3. Sila ke-3: "Persatuan Indonesia

# Kandungan:

- a. Rela berkorban untuk negara
- b. Bangga tanah air
- c. Tertib bernegara
- d. Persatuan

# 4. Sila ke-4 : "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"

# Kandungan:

- a. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama
- b. Musyawarah
- c. Tidak memaksakan kehendak
- d. Menghormati hasil musyawarah
- e. Menerima dan menjalankan hasil musyawarah
- f. Mendukung kepentingan bersama

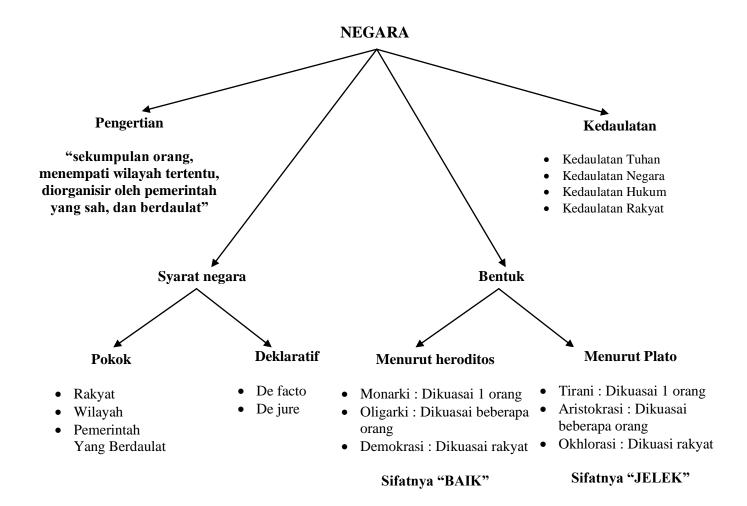
# 5. Sila ke-5: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

### Kandungan:

- a. Rasa kekeluargaan
- b. Gotong royong
- c. Seimbang antara hak dan kewajiban
- d. Menghormati hak orang lain
- e. Saling tolong menolong
- f. Rendah hati dan sederhana
- g. Tidak merugikan orang lain
- h. Menyukai kegiatan sosial
- Pancasila adalah dasar negara
- Menjadi pedoman hidup bernegara
- Fungsi pancasila : sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideology

#### SEJARAH RUMUSAN PANCASILA

- 1. Rumusan Soepomo (diajukan 31/7/1945)
  - a. Persatuan
  - b. Kekeluargaan
  - c. Keseimbangan lahir dan batin
  - d. Musyawarah
  - e. Keadilan rakyat
- 2. Usulan M.Yamin (diajukan tertulis)
  - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  - c. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3. Usulan Soekarno (diajukan 1/6/1945)
  - a. Kebangsaan Indonesia
  - b. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  - c. Mufakat atau demokrasi
  - d. Kesejahteraan sosial
  - e. Ketuhanan yang berkebudayaan
- 4. Rumusan Piagam Jakarta (22/6/1945)
  - Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
  - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - c. Persatuan Indonesia
  - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



#### PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
- Mewujudkan rasa keadilan sosial
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah
- Mengutaman persatuan nasioanl dan kekeluargaan
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

-Semoga Bermanfaat-